



Arah Kebijakan Dana Transfer Khusus

Direktorat Otonomi Daerah
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS - Republik Indonesia

Batam, 22 Maret 2019



Regulasi Terkait Dana Transfer Khusus

- 1 UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
- 2 UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 3 PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
- 4 PP No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Nasional
- 5 Perpres No.141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik Tahun 2019
- 6 PMK No.121 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PMK No.50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
- 7 PMK No.112/PMK.07/2018 tentang Perubahan atas PMK No.50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa



Perkembangan Alokasi Dana Transfer Khusus



Tabel Alokasi dan Realisasi TKDD 2015-2019 (Rp Triliun)

Jenis Dana	2015			2016			2017			2018			2019
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	
DBH	97,9	78,1	79,8%	109,1	90,5	83,0%	88,3	88,2	99,9%	89,2	93,7	105,0%	106,4
DAU	352,9	352,9	100,0%	385,4	385,4	100,0%	398,6	398,6	100,0%	401,5	401,5	100,0%	417,9
DAK Fisik	58,8	54,9	93,4%	89,8	75,2	83,7%	69,5	62,1	89,4%	62,4	58,1	93,1%	69,3
DAK Non Fisik	102,7	97,2	94,6%	121,2	88,7	73,2%	115,1	105,6	91,7%	123,5	115,3	93,4%	131,0
DID	1,7	1,7	100,0%	5,0	5,0	100,0%	7,5	7,5	100,0%	8,5	8,2	96,5%	10,0
Dana Otsus dan DIY	17,7	17,7	100,0%	18,8	18,8	100,0%	20,2	20,2	100,0%	21,1	21,1	100,0%	22,2
Dana Desa	20,8	20,8	100,0%	47,0	46,7	99,4%	60,0	59,8	99,7%	60,0	59,9	99,8%	70,0
Total TKDD	652,4	623,1	95,5%	776,3	710,3	91,5%	759,3	742,0	97,7%	766,2	757,8	98,9%	826,8

Beberapa Kebijakan Baru DAK Fisik TA.2019:

1. Pemanfaatan aplikasi KRISNA dalam proses pengusulan, sinkronisasi, hingga penyusunan RK DAK Fisik (tidak lagi manual)
2. Integrasi aplikasi KRISNA dan OM SPAN
3. Penguatan peran APIP dalam proses pemantauan dan evaluasi DAK

Penyaluran dan Realisasi DAK Fisik per-Bidang TA 2017 dan 2018 (Rp Miliar)

Bidang DAK Fisik	2017			2018		
	Pagu	Penyaluran	%	Pagu	Penyaluran	%
Air Minum	1.200,3	1.057,1	88,07%	2.070,7	1.906,1	92,05%
Energi Skala Kecil	502,3	330,3	65,76%	500,1	307,3	61,45%
Irigasi	4.005,1	3.532,8	88,21%	4.246,2	3.787,8	89,20%
Jalan	19.690,1	18.122,9	92,04%	18.202,9	17.358,3	95,36%
Kelautan dan Perikanan	926,5	769,0	83,00%	879,7	798,3	90,75%
Kesehatan	17.104,9	14.499,8	84,77%	17.979,7	16.626,7	92,48%
Pariwisata	504,4	417,1	82,69%	632,0	563,7	89,20%
Pasar	1.035,7	887,4	85,68%	1.772,7	1.575,3	88,87%
Pendidikan	8.058,9	6.726,2	83,46%	9.137,5	8.788,7	96,18%
Pertanian	1.650,0	1.491,0	90,36%	1.681,7	1.552,3	92,31%
Perumahan dan Pemukiman	1.038,2	933,2	89,89%	1.029,6	971,8	94,39%
Sanitasi	1.250,2	1.145,4	91,61%	2.161,0	2.062,2	95,43%
Sentra Industri Kecil dan Menengah	531,5	461,1	86,76%	563,7	501,7	89,00%
Transportasi	844,1	711,1	84,25%	1.078,1	954,7	88,55%
Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	-	500,7	394,3	78,74%
Penyelesaian DAK Fisik 2016	9.233,3	9.135,7	98,94%			
Percepatan IPD Bidang Jalan	1.802,7	1.741,5	96,60%			
Percepatan IPD Bidang Irigasi	153,3	142,8	93,16%			
Jumlah	69.531,5	62.104,2	89,32%	62.436,3	58.149,3	93,13%



2

PROSES PERENCANAAN – PENGANGGARAN DAK FISIK TAHUN 2019



ARAH KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN 2019



10 Bidang
DAK Reguler



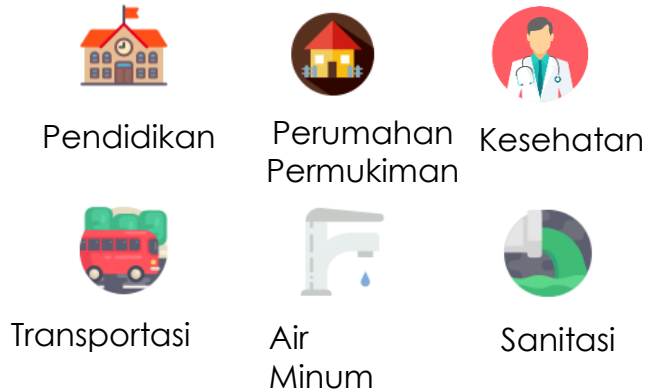
Meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan pelayanan dasar dan pemerataan ekonomi.



6 Bidang
DAK Afirmasi



Mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar pada lokasi prioritas yang termasuk kategori daerah perbatasan, kepulauan, tertinggal, dan transmigrasi (Area/Spatial Based).



9 Bidang
DAK Penugasan



Mendukung pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2019 yang menjadi kewenangan daerah dengan lingkup kegiatan spesifik dan lokasi prioritas tertentu



- **Bidang DAK Tahun 2019 sama dengan tahun sebelumnya**, hanya dilakukan relokasi untuk beberapa bidang dengan pertimbangan kesesuaian dengan Arah Kebijakan RKP 2019 → mengingat sekarang merupakan periode akhir RPJMN 2015-2019.
- Sesuai dengan Surat Menteri ESDM, **usulan DAK Bidang Energi Skala Kecil Tahun 2019 tidak dilanjutkan**
- **Penentuan Menu Kegiatan didasarkan kepada:**
 1. Kesesuaian dengan kewenangan daerah sesuai dengan lampiran UU No. 23/2014
 2. Dukungan terhadap Prioritas Nasional RKP 2019 dan SPM



TIMELINE PERENCANAAN-PENGANGGARAN DAK FISIK 2019



JANUARI

15 Januari
Rapim Penentuan Bidang DAK



FEBRUARI

01 Februari
Multilateral Meeting I DAK Fisik



MARET

09 Maret: Sosialisasi Aplikasi ke K/L
12-16 Maret Sosialisasi Aplikasi KRISNA untuk **pengusulan DAK Fisik kepada Pemda**



APRIL

19 Maret- 16 April Pengusulan DAK Fisik oleh Daerah
17 – 24 April Verifikasi Provinsi dan Pusat (untuk usulan Provinsi)
25 April – 11 Mei Verifikasi untuk usulan Kab/ Kota



MEI

02 – 11 Mei: Pembahasan DAK Penugasan dan Afirmasi di Musrenbangnas
23-31 Mei Pembukaan KRISNA khusus untuk Daerah yang di rekomendasikan KL



JUNI

M1-2 Juni Sidang Kabinet dan Penetapan Perpres RKP (termasuk lokasi prioritas DAK Penugasan dan Afirmasi serta alokasi per-bidang DAK)



JULI

M2 Juni -M4 Juli
Penilaian Pusat



AGUSTUS

1-26 Agustus Sinkronisasi Online Usulan DAK
26 Agustus-M2 September Finalisasi Hasil Penilaian oleh Pusat



SEPTEMBER

M1-M2 September TM IV Penilaian Final oleh Pusat
September-Oktober Pembahasan dengan DPR-& penetapan pagu alokasi DAK per-daerah



OKTOBER

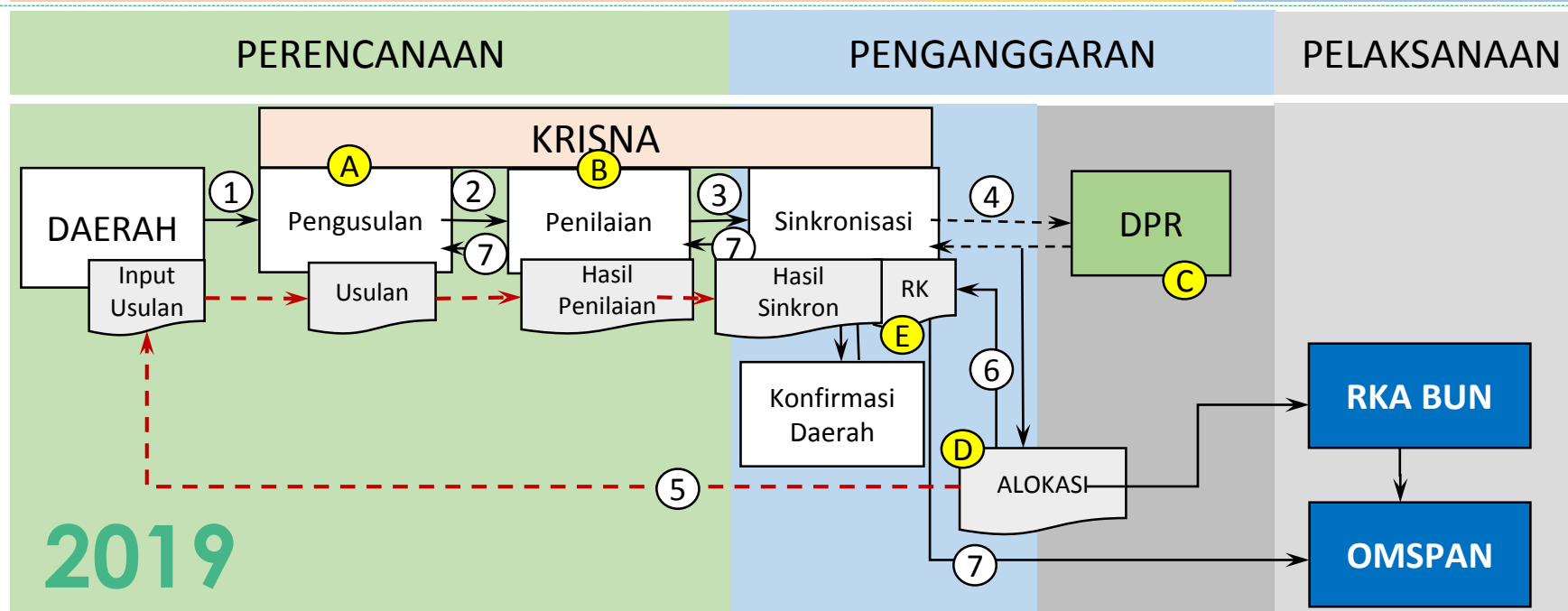
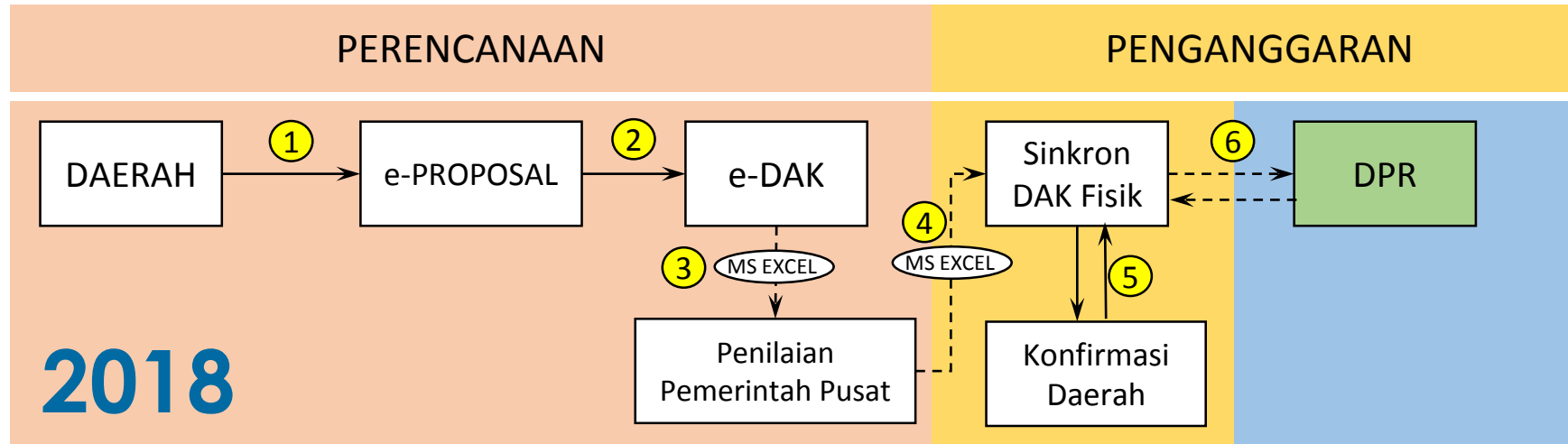
NOVEMBER

DESEMBER

November - Desember
Penyusunan Rencana Kegiatan (RK)
HINGGA BULAN FEBRUARI 2019



Penyempurnaan Aplikasi Pengusulan dan Penilaian DAK Fisik Tahun 2019





DATA USULAN DAK FISIK TAHUN 2019 DALAM APLIKASI KRISNA DAK DATA PER-01 AGUSTUS 2018



NO.	BIDANG	Jumlah Usulan	Nilai Usulan (Triliun Rp)
1	Pendidikan	243.026	67,88
2	Kesehatan dan KB	120.749	74,46
3	Jalan	15.280	171,17
4	Air Minum	15.807	23,31
5	Sanitasi	16.589	8,67
6	Perumahan dan Permukiman	16.141	60,99
7	Irigasi	12.031	15,82
8	Industri Kecil Menengah	3.019	3,49
9	Pariwisata	10.148	37,3
10	Kelautan dan Perikanan	16.715	6,19
11	Pertanian	47.277	11,36
12	Energi Skala Kecil	1.370	3,77
13	Pasar	2.905	8,76
14	Transportasi	7.234	24,65
15	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	8.010	2,89
TOTAL		536.301	520,7

Nilai Usulan dalam aplikasi KRISNA mencapai Rp.520,7 Trilyun atau sekitar **6 kali lipat LEBIH BESAR** dibandingkan alokasi DAK Fisik Tahun 2019

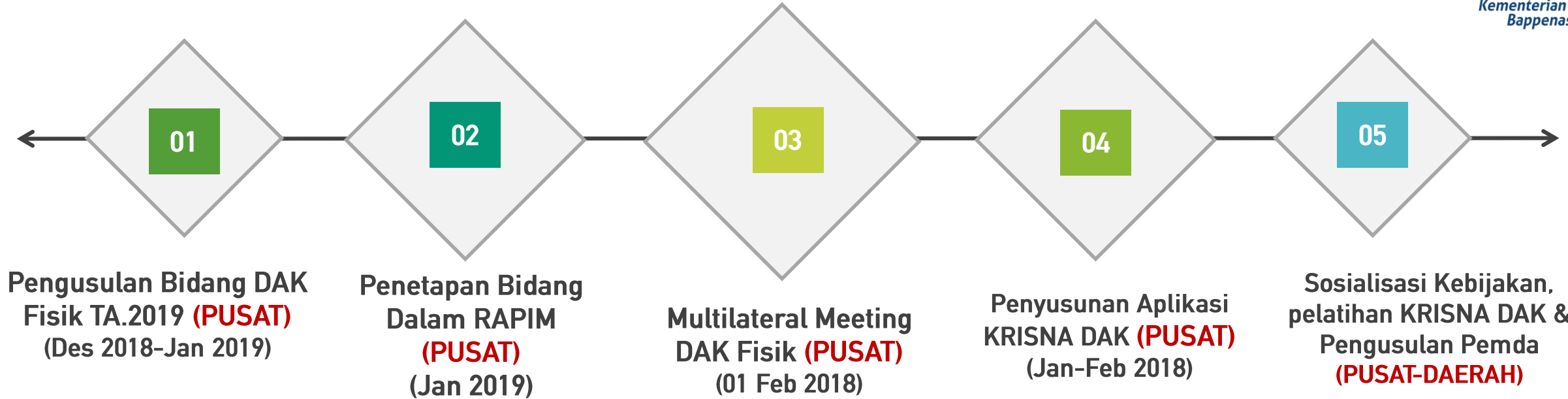


TAHAPAN DALAM APLIKASI KRISNA DAK FISIK TA. 2019 GAMBARAN TAHAP & TIMELINE DAK FISIK TA.2020)





(1) Proses Perencanaan DAK Fisik TA.2019



- Sosialisasi tgl 12-16 Maret 2018
- Pengusulan tahap I tgl 19 Maret – 16 April dan tahap II tgl 23-31 Mei 2018 (hanya untuk daerah penugasan / lokpri yg belum mengusulkan)



(2) Alur Data Pengusulan & Verifikasi DAK Fisik TA.2019



- **Verifikasi** dilakukan oleh **Bappeda Provinsi** dan **Kemendagri**
- Hasil verifikasi hanya berupa **“flagging”** yakni Flag Hijau untuk “usulan yang direkomendasikan dan Flag Kuning untuk “usulan direkomendasikan dengan catatan”
- Beberapa kriteria verifikasi sbb:
 1. Kesesuaian dengan **Prioritas Daerah**
 2. **Kewajaran nilai usulan** dan **kesesuaian dengan Lokus**
 3. **Kelengkapan data teknis** dan **ketersediaan TOR** (dengan *template* yang diberikan serta telah mencakup semua usulan dalam satu menu yang diusulkan)
 4. **Sinkronisasi** dengan Kebijakan Provinsi
 5. **Kesesuaian** dengan aspirasi masyarakat dan agenda kepala daerah
 6. Capaian terkait **SPM** (kriteria Kemendagri)
 7. **Pelaporan** (kriteria Kemendagri)



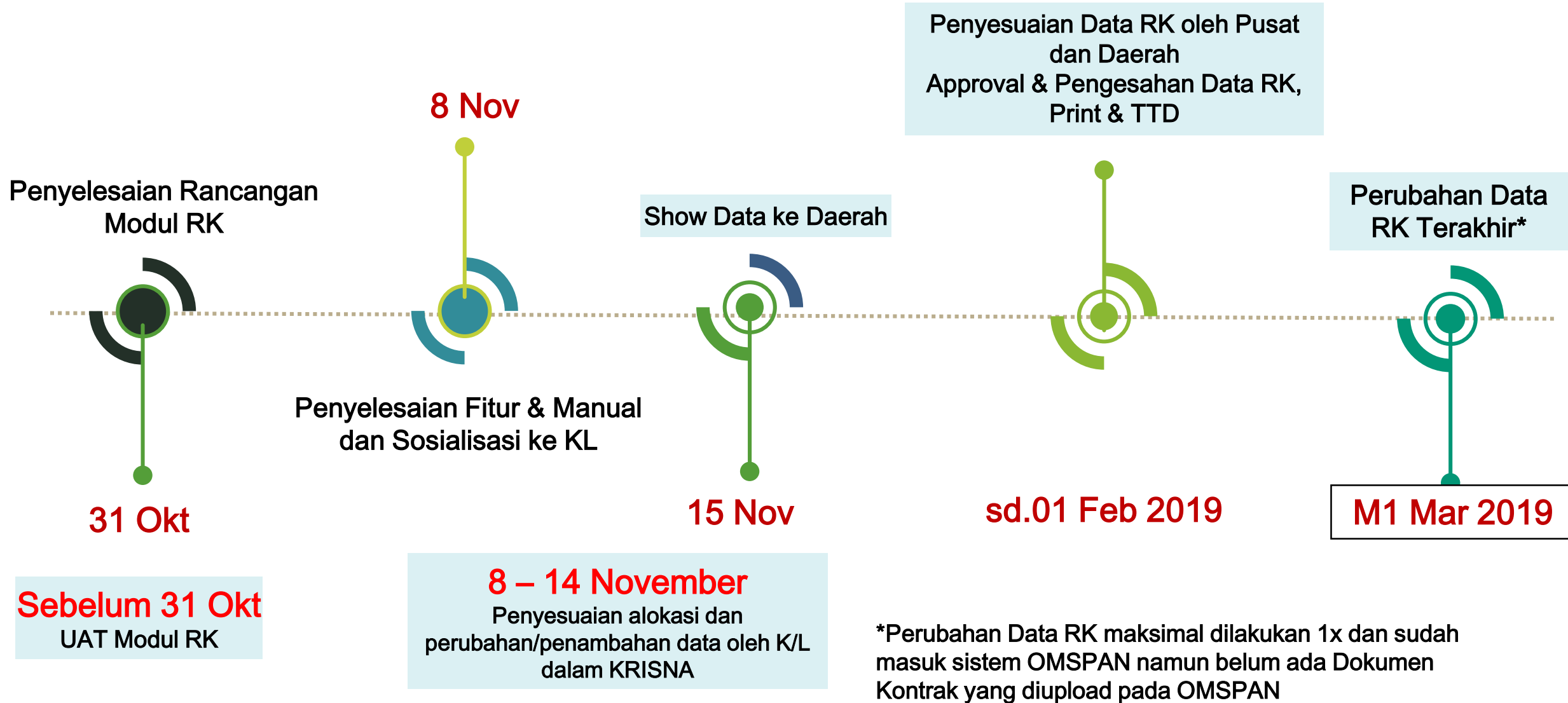


(3) Proses Penilaian Awal – Sinkronisasi – Penilaian Akhir – Pengalokasian DAK Fisik Tahun 2019





(4) Penyusunan RK DAK Fisik TA.2019





Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran DAK 2019

BIDANG DAK TA.2019

- Bidang tetap sesuai dengan DAK TA.2019 dengan tujuan mengoptimalkan output dan outcome di periode Kabinet Kerja
- Adanya penambahan subbidang baru yakni GOR dan Perpustakaan Daerah
- Adanya bidang yang mengalami perubahan jenis seperti Pariwisata menjadi reguler dan penugasan sementara Pasar hanya di jenis penugasan dengan tujuan mendukung capaian PN
- Adanya bidang DAK yang dihapuskan yakni bidang Energi Skala Kecil dengan pertimbangan efektivitas pelaksanaan
- Menu kegiatan antara jenis (Reguler/afirmasi/ penugasan) telah berbeda dan fokus

PROSES PERENCANAAN

- Payung hukum untuk proses perencanaan yang masih dalam proses penyusunan (Rapermen PPN belum rampung)
- Perbedaan persepsi mengenai lokpri untuk kebijakan DAK afirmasi sehingga adanya penyesuaian di tengah tahun perencanaan
- Proses MM dan TM perencanaan sudah tepat waktu namun masih banyaknya perubahan menu/rincian kegiatan setelahnya



ALOKASI

- Alokasi yang disampaikan tepat waktu dan relatif sesuai dengan hasil penilaian teknokratik (tidak ada deviasi yang disebabkan intervensi legislatif)
- Proses pembahasan antara Pemerintah dan DPR-RI tetap menjaga koridor "hanya usulan yang ada di dalam KRISNA sesuai usulan Pemda"

APLIKASI

- Penggunaan aplikasi KRISNA (perubahan dari aplikasi e-planning) yang telah mengintegrasikan semua proses dan stakeholder dan dirasakan membuat proses lebih transparan dan akuntabel
- Masih dibutuhkannya penyesuaian oleh semua stakeholder dengan peralihan dari proses manual menjadi online
- Keterbatasan pemahaman oleh Pemda terkait dengan menu dan kegiatan sehingga terjadi kasus seperti "salah kamar penginputan" dan "salah input nilai usulan"
- Koordinasi antara Bappeda dan OPD dalam proses penginputan-sinkronisasi-RK perlu dioptimalkan
- Adanya kendala seperti koneksi internet di beberapa daerah
- Manual penggunaan aplikasi KRISNA yang belum dipahami oleh Pemda dan K/L

PROSES PENILAIAN & PENGANGGARAN

- Belum ditetapkannya SOP penilaian bagi Dit.Sektor dan K/L (proses penyusunan Rapermen PPN masih berlangsung)
- Rangkaian proses TM penilaian dan penganggaran (TM I-VI) yang lebih panjang dengan tujuan menjaga *governance*
- Perlu kesepakatan mengenai levelling penilaian antara Dit.sektor Bappenas dan K/L



3

ARAH KEBIJAKAN DAK TAHUN 2020



Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020

TEMA:

“Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”



Kesetaraan Gender

Tata Kelola

Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim

Modal Sosial Budaya

Transformasi Digital

Pengarusutamaan



Arah Kebijakan Dana Transfer Khusus Tahun 2020



1. Mendorong pemenuhan pelayanan publik dasar di daerah
2. Tematik sesuai dengan Prioritas Nasional
3. Mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah
4. Kesesuaian dengan kewenangan daerah sesuai dengan lampiran UU No. 23/2014
5. Refocusing berdasarkan efektifitas menu & kegiatan DAK
6. Kinerja fisik dan anggaran masing-masing bidang
7. Memperhatikan Ketersediaan data

3 Jenis DAK Fisik

- **Reguler (R)** – Untuk mendukung pemenuhan **sarana dan prasarana dasar** yang mendukung **pelayanan publik dan dimensi pembangunan RPJMN 2020-2024** (Pendidikan, Kesehatan dan KB, Air Minum, Sanitasi, Perumahan Permukiman, Jalan);
- **Afirmasi (A)** – Untuk mendukung **pemerataan pelayanan dan mendorong percepatan pembangunan di daerah** yang memiliki karakteristik tertentu seperti daerah tertinggal, terluar, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi (terdapat dasar hukum yang berlaku);
- **Penugasan (P)** – Dapat dialokasikan dalam tema tertentu guna mendukung capaian Prioritas Nasional (PN) tertentu dan Arahannya Presiden





Arah Kebijakan DAK Fisik Tahun 2020



DAK Reguler

Mendukung pemenuhan sarana dan prasarana dasar, yang mendukung pelayanan publik.



DAK Afirmasi

Mendukung pemerataan pelayanan dan mendorong percepatan pembangunan di daerah yang memiliki karakteristik tertentu seperti daerah tertinggal, terluar, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi.



DAK Penugasan

Mendukung Tema prioritas nasional serta Arah-an Bapak Presiden lainnya.

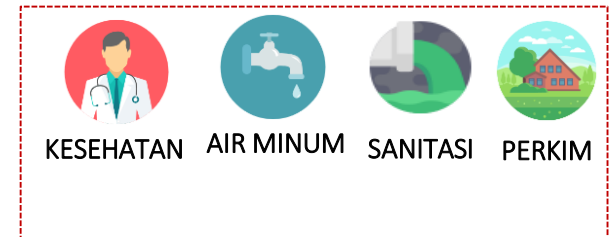
Pengembangan Ekonomi Lokal dan Kreatif



Ketahanan Pangan & Pembangunan Berkelanjutan



Penurunan Stunting



**Merupakan Bidang Baru DAK Fisik*


Keterangan:

- **DAK Sosial (Reguler)** dan **DAK Transportasi Laut/Perairan (Penugasan dan Afirmasi)** sebagai bidang baru DAK Fisik tahun 2020
- **Subbidang Perhubungan** sebagai subbidang baru di DAK Fisik bidang Jalan (Penugasan)
- **Subbidang Perpustakaan** di bidang Pendidikan
- **Subbidang KB dan GOR** di bidang Kesehatan
- **Penyesuaian bidang per-jenis** (misalnya Pertanian, KKP dan IKM berubah dari jenis reguler ke Penugasan)




Arah Kebijakan DAK Non Fisik Tahun 2020

Jenis DAK NonFisik Operasional

1 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 

2 Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) 

3 Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus 

4 Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD

5 Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD

6 Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan 

7 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 


8 Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)

9 Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan 

Jenis DAK NonFisik Non-Operasional

10 Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (P2UKM) 

11 Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS) 

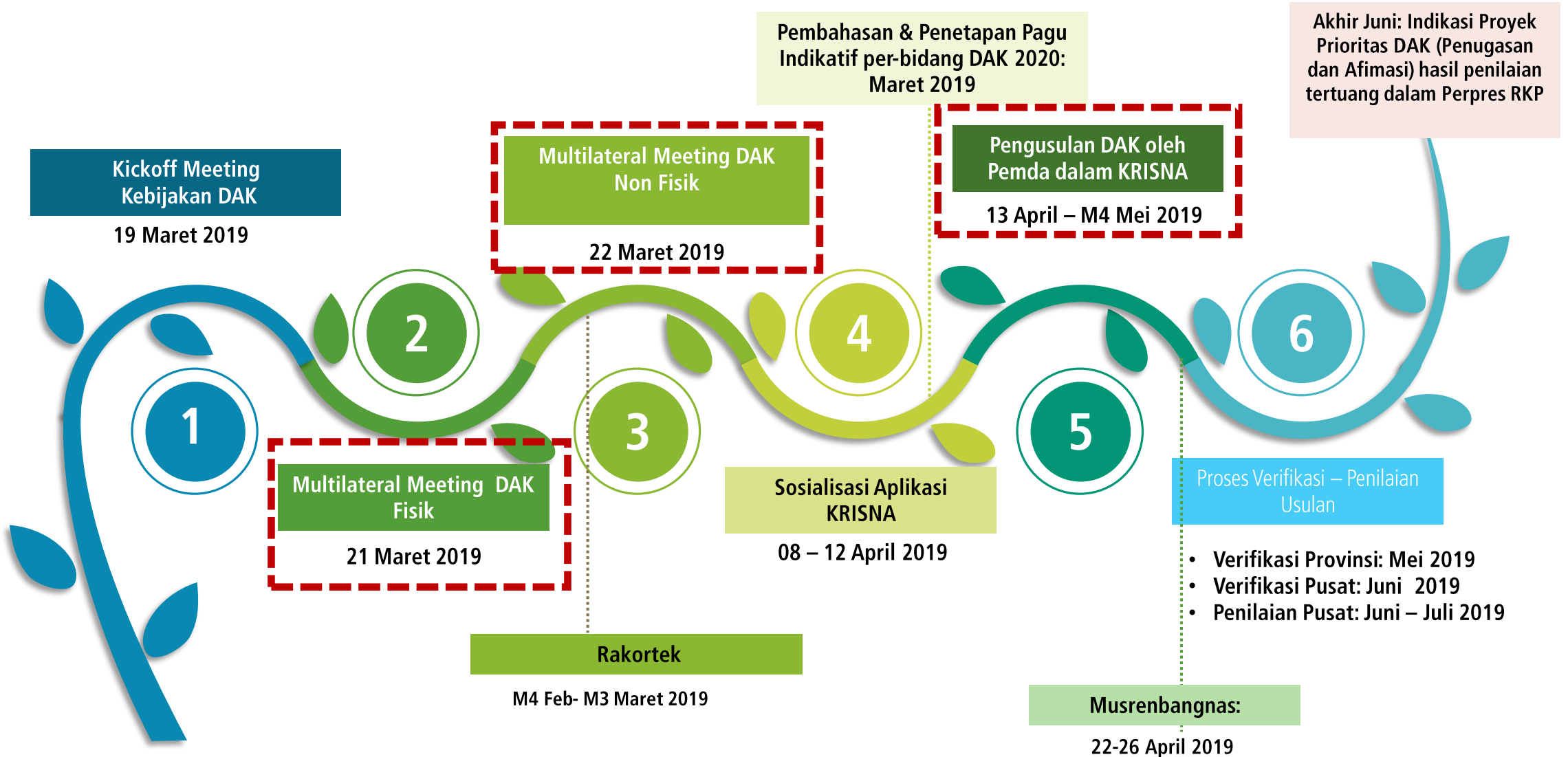
12 Dana Pelayanan Kepariwisataaa n 

13 Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya 

- Jenis DAK NonFisik yang bersifat operasional DILANJUTKAN sebagai amanat undang-undang (Pemenuhan anggaran pendidikan 20% dan kesehatan 5% dan APBN, serta UU Adminduk)
- Jenis DAK NonFisik yang bersifat non-operasional dilanjutkan dengan penajaman kegiatan
- Tidak ada penambahan bidang baru DAK Nonfisik Tahun 2020



TIMELINE PERENCANAAN DAK FISIK & NON FISIK TAHUN 2020*



*Bersifat tentatif



RANCANGAN TAHAPAN DALAM APLIKASI KRISNA DAK FISIK TA. 2020





Rancangan Penyempurnaan Aplikasi KRISNA

- 1. Pemisahan antara jenis DAK Fisik dalam proses input**
- 2. Pemisahan usulan kegiatan fisik dan kegiatan penunjang**
- 3. Proses verifikasi Pusat dengan beberapa kriteria yang “di-klik” oleh verifikator**
- 4. Data referensi (tidak drill down) sehingga tidak terjadi kesalahan nomenklatur**
- 5. Penambahan beberapa fitur yang bertujuan memudahkan proses perencanaan hingga penganggaran di tingkat Pusat dan Daerah**





Beberapa Masukan



1. Proses koordinasi antara Bappeda dan OPD (Daerah) dan Pusat – Daerah (dengan Bappenas, Kemenkeu, K/L dan Kemendagri)



2. Proaktif terhadap *update* informasi

3. Perhatikan panduan (manual) dan informasi yang diberikan baik di aplikasi maupun media komunikasi lainnya



4. Perhatikan *timeline* (dari tahap pengusulan – verifikasi – sinkronisasi- RK) → *lesson learned* dari daerah yang belum menyelesaikan RK hanya karena belum sign)





REPUBLIK INDONESIA



TERIMA KASIH

otda@bappenas.go.id



**LAMPIRAN: PEMETAAN DUKUNGAN
BIDANG DANA TRANSFER KHUSUS
TERHADAP PRIORITAS NASIONAL RKP
TAHUN 2020**



Dukungan DAK terhadap PN 1: Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan



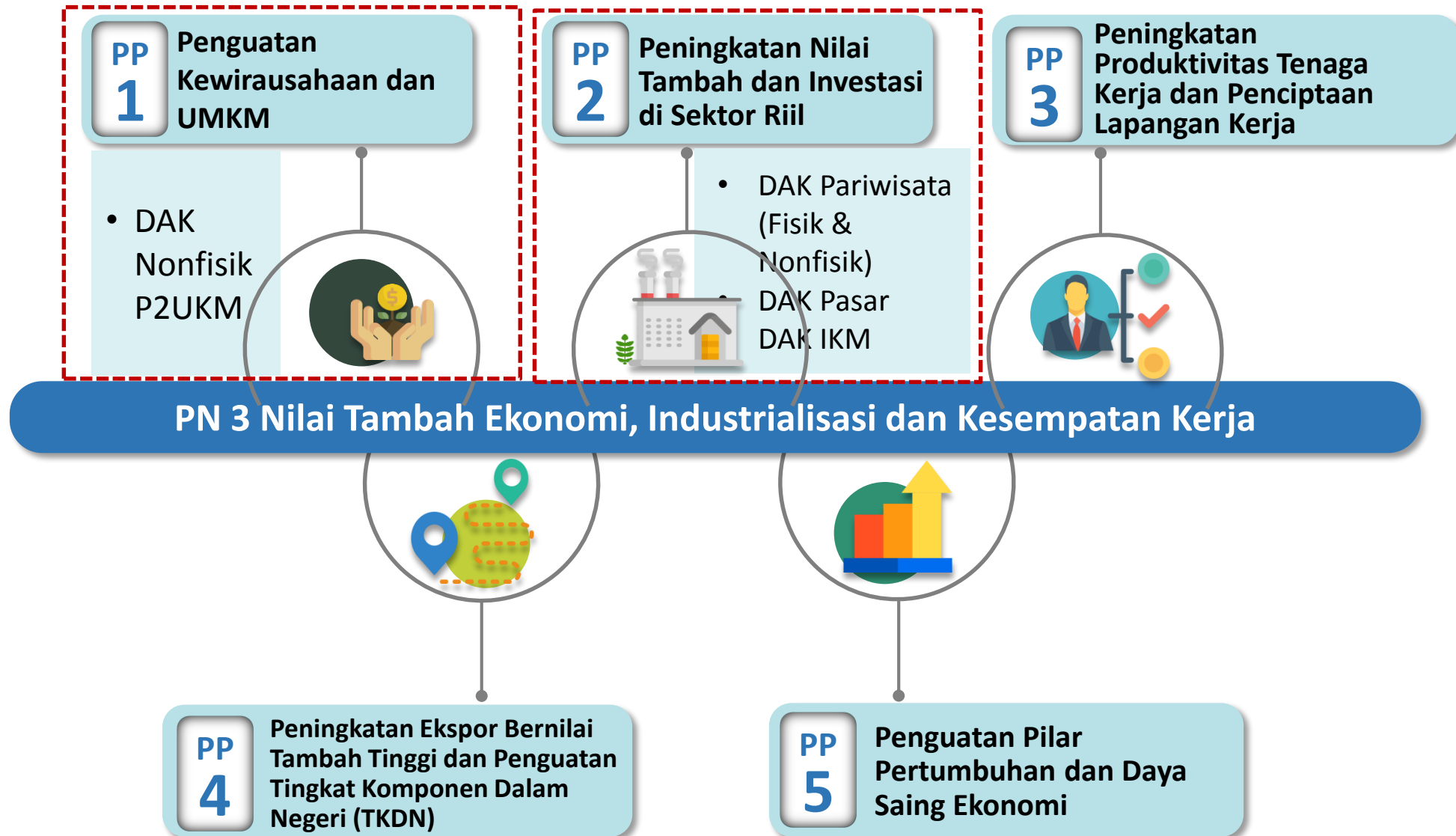


Dukungan DAK terhadap PN 2: Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah





Dukungan DAK terhadap PN 3: Nilai Tambah Ekonomi, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja





Dukungan DAK terhadap PN 4: Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup

